Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 4, Nomor 1, April 2026 (1-10)
e-ISSN 3025-0374
DOI 10.24252/rkjpm.v4i1.65242
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ruangkomunitas

Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2025-2029

Syahril, Fadil Muhammad*, Selly Kudrati Ningsih, Airul Syahrif, Husni Mubarak
Universitas Negeri Makassar
fadil.muhammad@unm.ac.id

Info Artikel

Dikirim 2 Februari 2026
Direvisi -
Diterima 1 April 2026

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi di Kabupaten Mamuju Tengah yang memerlukan perencanaan strategis dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan analisis akar masalah dan pemetaan data sering kali menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan yang implementatif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029 yang berbasis bukti (evidence-based policy). Metode yang digunakan adalah sosialisasi teknis melalui ceramah dan Focus Group Discussion (FGD), serta asistensi intensif baik secara daring maupun luring. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap regulasi Permendagri No. 53 Tahun 2020 dan penguatan kemampuan teknis dalam mengintegrasikan data mikro ke dalam analisis kebijakan. Luaran konkret dari kegiatan ini adalah tersusunnya draf dokumen RPKD yang terdiri dari enam bab sistematis, mencakup profil kemiskinan hingga rencana aksi yang terukur. Meskipun terdapat hambatan berupa ego sektoral dan keterbatasan data mutakhir, pendampingan ini berhasil mengorkestrasi sinergi antara kepakaran akademisi dan birokrasi untuk menciptakan dokumen perencanaan yang transparan dan akurat.

Kata Kunci

Pendampingan, Dokumen RKPD, Mamuju Tengah

Abstract

Poverty remains a multidimensional challenge in Central Mamuju Regency, necessitating strategic planning and policy synchronization between central and local governments. However, limited human re-

Copyright © The Author(s), 2026.

source capacity in conducting root cause analysis and spatial mapping often hinders the formulation of implementable planning documents. This community service activity aims to assist the Poverty Reduction Coordination Team (TKPK) of Central Mamuju Regency in drafting the Regional Poverty Reduction Plan (RPKD) for the 2025-2029 period based on evidence-based policy. The methods employed included technical socialization through lectures and Focus Group Discussions (FGD), as well as intensive assistance conducted both online and offline. The results indicated an increase in the technical capacity of local government apparatus in understanding the mandates of Ministry of Home Affairs Regulation No. 53 of 2020 and integrating micro-data into policy analysis. The concrete output of this activity is a draft RPKD document consisting of six systematic chapters, ranging from poverty profiles to measurable action plans. Despite challenges such as sectoral ego and limited updated micro-data, this assistance successfully orchestrated a synergy between academic expertise and bureaucracy to create a transparent and accurate planning document.

Keywords Asistance, Poverty Reduction Document, Mamuju Tengah

Pendahuluan

Kemiskinan tetap menjadi tantangan multidimensi yang paling krusial bagi pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Sebagai isu yang kompleks, penanganan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar materiil, namun juga mencakup akses terhadap keadilan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang inklusif. Pendekatan multidimensi ini menjadi sangat relevan mengingat kemiskinan di Indonesia sering kali berkorelasi erat dengan rendahnya kualitas modal manusia dan aksesibilitas terhadap fasilitas publik (Harahap, 2022). Pemerintah pusat telah menetapkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang mensyaratkan adanya konvergensi program dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang dirancang mampu menyasar akar penyebab kemiskinan secara spesifik di setiap wilayah (Hidayat & Muhammad, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif yang menekankan bahwa pengurangan kemiskinan harus dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Fikri et al., 2015).

Secara formal, amanat mengenai tata kelola penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Eksistensi regulasi ini memperkuat legalitas TKPK dalam menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor yang selama ini sering menjadi titik lemah dalam birokrasi daerah

(Alfisyahrin, 2021). Regulasi ini mewajibkan setiap daerah untuk menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai instrumen perencanaan strategis berjangka lima tahun yang menjadi kompas bagi arah kebijakan, strategi, dan lokasi prioritas pengentasan kemiskinan. Penyusunan RPKD yang berkualitas memungkinkan pemerintah daerah untuk memetakan sumber daya lokal secara lebih optimal guna mendanai program-program inovatif pengentasan kemiskinan(Ramadani & Firdaus, 2025). Dokumen ini menjadi sangat krusial karena berfungsi sebagai dasar sinkronisasi antara visi kepala daerah dalam RPJMD dengan program operasional di tingkat perangkat daerah.

Namun, pada realitasnya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala signifikan dalam menyusun dokumen RPKD yang berkualitas dan implementatif. Kondisi yang seringkali terjadi ialah belum optimal serta adanya kesenjangan antara ketersediaan data kemiskinan dengan perumusan program di lapangan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal dalam melakukan analisis akar masalah (*root cause analysis*) dan pemetaan spasial kantong kemiskinan menyebabkan dokumen perencanaan yang dihasilkan cenderung bersifat administratif formalitas semata, tanpa menyentuh substansi permasalahan lokal. Kondisi seperti itu seringkali menyebabkan dampak dari sebuah program tidak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan karena tidak didasarkan pada bukti empiris yang kuat di tingkat lapangan (Darmi & Mujtahid, 2020).

Kesenjangan antara mandat regulasi dengan kapasitas implementasi di daerah inilah yang menjadi landasan urgensi kegiatan pengabdian ini. Perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memberikan asistensi teknis. Keterlibatan akademisi dalam pendampingan ini berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara teori perencanaan dengan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah lokal (Handayani & Zulfatillah, 2025). Melalui pendampingan ini, diharapkan proses penyusunan dokumen Penanggulangan Kemiskinan tidak hanya memenuhi tuntutan legalitas, tetapi juga berbasis pada data yang akurat *(evidence-based policy)* dan partisipatif. Penerapan kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk menjamin bahwa setiap intervensi yang dirancang memiliki akurasi tinggi dan mampu memitigasi risiko kegagalan program (Ramadani & Firdaus, 2025).

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memfasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Mamuju dalam menganalisis profil kemiskinan daerah, menyelaraskan indikator kinerja, serta merumuskan rencana aksi yang terukur. Dengan adanya sinergi antara kepakaran akademisi dan pengalaman praktis birokrasi, diharapkan akan lahir sebuah dokumen perencanaan yang mampu mengorkestrasi berbagai sumber daya baik APBD, APBN, maupun dana non-pemerintah secara efektif guna mencapai target penurunan angka kemiskinan yang signifikan dan berkelanjutan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu sosialisasi teknis dan pendampingan intensif (asistensi teknis) secara online (daring) maupun offline. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan adanya transfer pengetahuan sekaligus pengawalan substantif terhadap dokumen yang disusun.

1. Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas
Tahap ini bertujuan untuk membekali anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan pemangku kepentingan terkait dengan landasan regulasi serta metodologi penyusunan dokumen rencana aksi. Adapun metode yang diterapkan adalah:

a. Metode Ceramah dan Pemaparan Materi
Pendekatan metode ceramah digunakan dengan cara melakukan penjelasan terkait materi dari sebuah objek yang ingin disampaikan dalam sebuah forum(Fathurrahman et al., 2023). Tim pengabdian memaparkan secara komprehensif mengenai urgensi RPK berdasarkan Permendagri No. 53 Tahun 2020. Materi mencakup teknik analisis data kemiskinan, penentuan lokasi prioritas, serta penyelarasan indikator program antarperangkat daerah. Melalui pemaparan ini, peserta diberikan contoh praktis template dokumen RPK agar terjadi pertukaran informasi yang aplikatif.

b. Metode Diskusi Terfokus (*Focus Group Discussion*)
Salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang didesain untuk memperoleh informasi keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman peserta tentang suatu topik, dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator(Paramita & Kristiana, 2013). Metode ini digunakan untuk menggali pemahaman peserta mengenai tantangan spesifik di lapangan serta mendiskusikan kendala teknis dalam sinkronisasi data. Sesi tanya jawab interaktif ini berfungsi sebagai sarana konfirmasi atas draf awal kebijakan yang akan diusulkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan.

2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Dokumen
Tahap berikutnya yang dilakukan setelah sosialisasi ialah pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan output kegiatan tercapai secara optimal. Pendampingan ini merupakan proses monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penulisan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan. Tim pengabdian berperan aktif dalam memberikan supervisi kepada staf teknis di Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah guna mengatasi hambatan dalam pengolahan data maupun perumusan strategi intervensi. Proses supervisi tersebut sangat krusial guna menjembatani kesulitan teknis dalam mengintegrasikan data mikro ke dalam analisis kebijakan yang lebih makro di

tingkat daerah (Indah et al., 2024). Fokus dari pendampingan ini adalah memastikan bahwa dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perencanaan, konsisten dengan RPJMD, dan siap untuk diimplementasikan secara administratif maupun operasional.

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan diawali oleh tim pengabdi dengan pengenalan mengenai kebijakan makro pembangunan daerah, lalu dilanjutkan dengan pembahasan spesifik mengenai mandat Permendagri No. 53 Tahun 2020. Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai teknik analisis data kemiskinan makro dan mikro, pemetaan kantong kemiskinan, hingga penyusunan rencana aksi program yang terintegrasi. Dengan memahami substansi Permendagri tersebut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dapat menyusun dokumen perencanaan yang jelas dan terstruktur, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait alokasi anggaran dan penentuan sasaran program jangka menengah.

Pemahaman mendalam terhadap tahapan penyusunan dokumen Penanggulangan Kemisikinan memungkinkan aparatur pemerintah daerah menghasilkan dokumen yang lebih akurat dan informatif, sehingga memudahkan dalam membuat keputusan strategis guna menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Peningkatan kapasitas teknis aparatur dalam memahami siklus perencanaan ini menjadi determinan utama dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap dinamika masalah kemiskinan di tingkat lokal (Hapsari, 2021). Tujuan utama dari pendampingan ini adalah untuk menghasilkan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan yang transparan, berbasis data *(evidence-based*), dan dapat diandalkan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai target serta lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah.

Salah satu narasumber dari pihak akedemisi yang hadir sebagaimana yang terlihat pada gambar 1, berperan menyampaikan arahan strategi implementasi program penanganan kemiskinan di Mamuju Tengah. Kehadiran kepakaran dari kalangan akademisi ini menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa setiap strategi yang dirumuskan didasarkan pada analisis sosiologis dan ekonomi yang mendalam mengenai karakteristik unik masyarakat (Dinworo, 2013). Oleh karena itu, sinergi antara arahan strategis pakar dengan kapasitas eksekusi birokrasi di tingkat lokal menjadi kunci utama dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan dapat terorkestrasi dengan baik dan tepat sasaran (Ramadhana & Sugandi, 2025).

Gambar 1. Pemaparan Teknis oleh Narasumber



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025.

Respons positif dari peserta pendampingan terhadap kegiatan ini ditunjukkan dari banyaknya pertanyaan dan sharing pengalaman yang diberikan oleh para peserta terkait kendala koordinasi lintas perangkat daerah. Ketertarikan peserta dalam memahami teknis penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan terlihat dari pertanyaan-pertanyaan terkait metodologi penulisan dan sinkronisasi indikator kinerja utama. Para peserta berharap proses pendampingan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi terciptanya dan validitas dokumen perencanaan daerah di masa mendatang. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdi selama kegiatan memberikan motivasi kepada para peserta untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data melalui upaya perluasan cakupan intervensi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap objektivitas program kemiskinan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan diantaranya Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, Bapperida, Dinas Sosial, Disperindagkop, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Berikut salah satu dokumentasi pada saat proses audiensi dan pendampingan penyusunan dokumen dengan berbagai pihak.

Proses sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Dokumen ini memiliki serangkaian faktor penghambat, seperti keterbatasan ketersediaan data mikro yang mutakhir, ketidaktersediaan waktu yang memadai di sela rutinitas birokrasi, tingkat pemahaman teknis yang berbeda antar-SKPD atau instansi, serta kendala koordinasi antar-sektor dalam integrasi program. Fenomena ego sektoral di lingkungan pemerintahan daerah seringkali menjadi penghalang utama dalam menyatukan langkah koordinasi yang kohesif guna penanganan kemiskinan yang terpadu (Ramadhana & Sugandi, 2025). Untuk mengatasi faktor penghambat ini, tim pengabdi memberikan solusi strategis seperti peningkatan frekuensi

koordinasi teknis, penguatan pemahaman melalui simulasi pengolahan data, melakukan evaluasi berkala terhadap draf dokumen yang disusun, serta penyempurnaan materi asistensi agar lebih sesuai dengan karakteristik permasalahan kemiskinan di daerah setempat.

Gambar 2. Peserta Penyusun Dokumen RKPD



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025.

Beberapa poin yang ditekankan dalam proses pendampingan pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan ini adalah struktur dan sistematika penulisan. Pada rangkaian pengabdian tersebut disampaikan bahwasanya sistematika penulisan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 6 bab, yakni Bab I berisi Pendahuluan, Bab II berisi Kondisi Umum Daerah, Bab 3 berisi tentang Profil kemiskinan Daerah, Bab 4 berisi tentang Prioritas Program, Bab 5 berisi tentang Lokasi Prioritas dan Bab 6 sebagai bab penutup. Keseluruhan bab tersebut disusun secara berurutan dan dipenuhi dengan data yang tersedia pada internal Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Kepatuhan terhadap struktur penulisan yang baku sesuai pedoman nasional sangat penting guna memastikan bahwa dokumen daerah memiliki keterbacaan dan kualitas yang setara dengan instrumen perencanaan pusat (Yamani, 2024). Dokumen Penanganan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat terselesaikan pada Desember 2025.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian berupa pendampingan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2025-2029 telah berhasil dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu sosialisasi teknis dan asistensi intensif. Kegiatan ini secara efektif meningkatkan pemahaman dan kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan mandat Permendagri

No. 53 Tahun 2020, khususnya dalam teknik analisis data kemiskinan makro-mikro serta pemetaan kantong kemiskinan. Sinergi antara kepakaran akademisi dan praktisi birokrasi terbukti mampu mengatasi hambatan administratif dan teknis, sehingga mendorong terciptanya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Luaran konkret dari kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya draf dokumen RPKD yang terdiri dari 6 bab sistematis, mulai dari pendahuluan hingga rencana aksi dan lokasi prioritas yang ditargetkan selesai pada Desember 2025. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola perencanaan daerah yang lebih transparan, akurat, dan responsif terhadap karakteristik permasalahan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Referensi

Alfisyahrin, D. (2021). Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang. *Jurnal Media Administrasi*, *3*(1), 86–99.

Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan kapasitas kebijakan dana desa dalam mengentaskan kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, *3*(1).

Dinworo, A. S. (2013). PERAN INSTITUSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN (Studi Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik). *Publika*, *1*(2).

Fathurrahman, F., Zein, Y. A., Syaprillah, A., & Nurvianti, D. (2023). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Tana Tidung. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)*, *3*(2), 82–92.

Fikri, R., Nurpratiwi, R., & Saleh, C. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Reformasi*, *5*(2), 60–65.

Handayani, S. P., & Zulfatillah, A. (2025). Peningkatan Efektivitas Administrasi Publik melalui Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bapperida Kabupaten Bangkalan. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, *3*(4), 104–114.

Hapsari, R. A. (2021). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). *Jurnal Administrasi Publik*, *11*(2).

Harahap, S. (2022). *Determinan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara.* IAIN Padangsidimpuan.

Hidayat, S., & Muhammad, A. S. (2024). STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL. *TheJournalish: Social and Government*, *5*(2), 183–189.

Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Hasanah, A. U., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron, B. (2024). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *7*(1), 99–118.

Paramita, A., & Kristiana, L. (2013). Teknik focus group discussion dalam penelitian kualitatif. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, *16*(2), 117–127.

Ramadani, M. P., & Firdaus, M. (2025). Implementasi Kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021-2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur. *AL-SULTHANIYAH*, *14*(2), 381–394.

Ramadhana, R., & Sugandi, Y. S. (2025). FORMULASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA CIREBON. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, *16*(2), 202–210.

Yamani, A. Z. (2024). Analisis kesesuaian proses legal drafting dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. *Zona Law And Public Administration Indonesia*, *2*(5), 49–58.